

Analisis Disparitas Pembangunan antara Wilayah Utara dan Wilayah Selatan Kota Palangka Raya

Analysis of Regional Development Disparities Between the Northern and Southern Regions of Palangka Raya City

Kurniawan Utama^{1*}, Hera Nugrahyu², Indrawan Permana³

^{1,2} Pemerintah Kota Palangka Raya, Indonesia

³ Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Palangka Raya, Indonesia

* Corresponding Author : utamakurniawan70@gmail.com

Sejarah Artikel

Diterima : 08 November 2024

Direvisi : 15 April 2025

Disetujui : 30 Juli 2025

Kata Kunci:

Disparitas pembangunan wilayah, Ketimpangan regional, Indeks Williamson, Infrastruktur wilayah, Strategi pembangunan

© 2025 Penulis

Diterbitkan oleh Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Palangka Raya. Artikel ini dapat diakses secara terbuka dibawah lisensi:



<https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/>

Abstrak. Disparitas pembangunan antarwilayah merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat disparitas pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan Kota Palangka Raya, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data primer melalui survei dan wawancara serta data sekunder dari berbagai instansi terkait. Analisis dilakukan menggunakan Indeks Kesenjangan Williamson, Ordinary Least Squares (OLS), dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai disparitas wilayah utara sebesar 0,3, sedangkan wilayah selatan sebesar 0,2, yang mengindikasikan bahwa wilayah selatan memiliki tingkat pemerataan pembangunan yang lebih baik. Analisis OLS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan ketersediaan infrastruktur merupakan faktor utama yang memengaruhi disparitas pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada penguatan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan peningkatan investasi di wilayah utara untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kota Palangka Raya.

Article History

Received: November 08, 2024

Revised: April 15, 2025

Accepted: July 30, 2025

Keywords:

Regional development disparities, Regional inequality, Williamson Index, Regional infrastructure, Development strategy

© 2025 Author

Published by Palangka Raya University's Master of Urban and Regional Planning Postgraduate. This article is available to the general public under a license:



<https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/>

Abstract. Regional development disparities remain a major challenge in achieving balanced development, as they influence economic growth, infrastructure provision, and community welfare. This study aims to analyze the level of development disparities between the northern and southern regions of Palangka Raya City, identify the factors influencing these disparities, and formulate strategies to reduce regional inequality. The study employed a quantitative descriptive approach using primary data collected through surveys and interviews, complemented by secondary data obtained from relevant government agencies. Data were analyzed using the Williamson Index, Ordinary Least Squares (OLS) regression, and SWOT analysis. The results indicate that the Williamson Index was 0.3 for the northern region and 0.2 for the southern region, suggesting that the southern region has a more balanced level of development. The OLS analysis revealed that economic growth, population size, and infrastructure availability are the main determinants of regional development disparities. Therefore, development policies should prioritize infrastructure improvement, local economic development, and investment promotion in the northern region to achieve more balanced and sustainable regional development in Palangka Raya City.

1. Pendahuluan

Pembangunan wilayah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelayanan publik, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Proses pembangunan tidak selalu berlangsung secara seimbang karena setiap wilayah memiliki kondisi geografis, sumber daya, jumlah penduduk, aksesibilitas, dan kapasitas ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan disparitas pembangunan, yaitu ketidakseimbangan tingkat kemajuan antarkawasan yang tercermin dari perbedaan pendapatan, ketersediaan infrastruktur, kesempatan ekonomi, dan kualitas pelayanan dasar. Disparitas yang tidak dikendalikan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, menghambat mobilitas ekonomi, serta menurunkan efektivitas pembangunan wilayah.

Ketimpangan regional berkaitan erat dengan pola pemusatan kegiatan ekonomi. Kawasan yang berdekatan dengan pusat pemerintahan, perdagangan, dan pelayanan publik cenderung memperoleh keuntungan aglomerasi berupa akses pasar, tenaga kerja, investasi, dan infrastruktur yang lebih baik. Sebaliknya, wilayah yang jauh dari pusat kegiatan sering menghadapi keterbatasan konektivitas, biaya distribusi yang lebih tinggi, serta rendahnya daya tarik investasi. Hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan wilayah juga bersifat dinamis; ketimpangan dapat meningkat pada tahap tertentu ketika aktivitas ekonomi terkonsentrasi, kemudian menurun apabila manfaat pertumbuhan mulai menyebar ke kawasan lain (Díez-Minguela et al., 2020). Kajian di Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan spasial masih menjadi persoalan penting, termasuk pada wilayah yang mengalami perkembangan perkotaan dan pembangunan infrastruktur secara tidak merata (Nawir et al., 2023).

Infrastruktur merupakan salah satu faktor utama dalam mengurangi kesenjangan pembangunan. Ketersediaan jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan jaringan komunikasi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi dan pelayanan dasar. Pembangunan jalan yang terencana mampu memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang pertumbuhan pada kawasan yang sebelumnya relatif terisolasi. Investasi infrastruktur juga dapat meningkatkan produktivitas dan menarik kegiatan usaha baru, tetapi manfaatnya bergantung pada lokasi, kualitas pelaksanaan, dan keterkaitannya dengan potensi ekonomi setempat. Bank Dunia menegaskan bahwa kesenjangan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi merupakan bagian penting dari persoalan ketimpangan di Indonesia.

Kota Palangka Raya memiliki karakter wilayah yang unik karena mencakup kawasan perkotaan, perdesaan, dan hutan dalam satu wilayah administrasi. Secara administratif, kota ini terdiri atas Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, Bukit Batu, dan Rakumpit. Pahandut dan Jekan Raya berkembang sebagai pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan, serta pelayanan perkotaan, sedangkan Bukit Batu dan Rakumpit berada lebih jauh dari kawasan inti (Perkasa et al., 2024). Perbedaan kedekatan terhadap pusat kota membentuk variasi dalam kepadatan penduduk, intensitas kegiatan ekonomi, aksesibilitas, dan ketersediaan fasilitas pelayanan. Publikasi statistik Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa kondisi kependudukan, ekonomi, dan infrastruktur berbeda antarkecamatan, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik setiap kawasan.

Dalam penelitian ini, wilayah utara merepresentasikan kawasan yang relatif jauh dari pusat perkotaan, sedangkan wilayah selatan memiliki keterhubungan lebih kuat dengan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Konsentrasi penduduk, kegiatan usaha, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan, dan jaringan jalan di wilayah selatan diduga menghasilkan tingkat pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah utara. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap kesempatan ekonomi dan pelayanan publik. Disparitas tidak hanya ditentukan oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga oleh distribusi penduduk dan ketersediaan infrastruktur. Penelitian pada tingkat subnasional di Indonesia juga menemukan bahwa ketimpangan antardaerah dapat terjadi dalam dimensi pembangunan manusia dan kesempatan memperoleh pelayanan dasar, bahkan perbedaan di dalam satu provinsi dapat lebih besar daripada perbedaan antarprovinsi (Sari & Tiwari, 2024).

Penelitian mengenai ketimpangan wilayah di Indonesia umumnya dilakukan pada skala nasional, provinsi, atau antarkabupaten/kota. Kajian yang membandingkan disparitas antarbagian wilayah dalam satu kota, terutama antara kawasan yang dekat dan jauh dari pusat kegiatan, masih relatif terbatas. Selain itu, banyak penelitian hanya mengukur tingkat ketimpangan ekonomi tanpa mengintegrasikan faktor jumlah penduduk, kondisi infrastruktur, dan strategi kebijakan pembangunan. Padahal, pengukuran tingkat disparitas perlu dilengkapi dengan identifikasi faktor penentu dan penyusunan strategi agar hasil penelitian dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat disparitas pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan Kota Palangka Raya, mengidentifikasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan ketersediaan infrastruktur terhadap disparitas, serta merumuskan strategi untuk mengurangi kesenjangan secara proporsional. Tingkat disparitas dianalisis menggunakan Indeks Williamson, faktor-faktor yang memengaruhinya dianalisis melalui regresi Ordinary Least Squares (OLS), sedangkan strategi pembangunan dirumuskan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur, memperkuat potensi ekonomi lokal, dan memperluas pemerataan pelayanan publik, khususnya di wilayah utara.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-eksplanatori untuk menganalisis disparitas pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan Kota Palangka Raya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran tingkat disparitas secara kuantitatif sekaligus menjelaskan hubungan antara variabel ekonomi, demografi, dan infrastruktur terhadap ketimpangan pembangunan wilayah (Rachmawati et al., 2025).

Penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wilayah analisis dibedakan menjadi wilayah utara dan wilayah selatan berdasarkan karakteristik perkembangan wilayah, aksesibilitas, serta konsentrasi aktivitas ekonomi. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan instansi terkait berupa data PDRB, jumlah penduduk, serta ketersediaan infrastruktur.

Analisis dilakukan dalam tiga tahapan. Tahap pertama menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur tingkat disparitas pembangunan antarkawasan. Indeks Williamson merupakan indikator yang banyak digunakan dalam penelitian ketimpangan regional karena mengukur variasi pendapatan per kapita dengan mempertimbangkan jumlah penduduk setiap wilayah (Azim et al., 2022a).

Tahap kedua menggunakan Ordinary Least Squares (OLS) untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan infrastruktur terhadap disparitas pembangunan. Model OLS dipilih karena mampu mengestimasi hubungan linear antarvariabel secara efisien serta banyak digunakan dalam penelitian pembangunan wilayah dan ketimpangan regional (Gunawan et al., 2026). Sebelum estimasi dilakukan, model diuji menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi agar memenuhi asumsi regresi klasik sehingga menghasilkan estimasi yang tidak bias dan konsisten.

Tahap ketiga menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) untuk menyusun strategi pengurangan disparitas pembangunan berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kondisi aktual wilayah. Analisis SWOT banyak digunakan dalam perencanaan pembangunan karena mampu mengintegrasikan faktor internal dan eksternal ke dalam alternatif strategi yang mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan (Fransiska & Setiawan, 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Disparitas Pembangunan Berdasarkan Indeks Williamson

Analisis disparitas pembangunan dilakukan menggunakan Indeks Williamson (IDW) untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan Kota Palangka Raya. Indeks ini banyak digunakan dalam kajian ekonomi regional karena mampu menggambarkan

variasi pembangunan antarwilayah berdasarkan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Dalam perspektif pembangunan wilayah, disparitas merupakan konsekuensi dari perbedaan kemampuan suatu wilayah dalam menarik investasi, mengembangkan aktivitas ekonomi, serta menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik (Iammarino et al., 2019)

Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah utara memiliki nilai Indeks Williamson sebesar 0,3, sedangkan wilayah selatan sebesar 0,2. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat disparitas pembangunan di wilayah utara masih lebih tinggi dibandingkan wilayah selatan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa aktivitas pembangunan masih terkonsentrasi pada kawasan selatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Sebaliknya, wilayah utara masih menghadapi keterbatasan akses terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan publik sehingga tingkat pemerataan pembangunannya relatif lebih rendah.

Temuan tersebut sejalan dengan Rodríguez-Pose (2022) yang menjelaskan bahwa wilayah yang berada di luar pusat pertumbuhan (*places that do not matter*) cenderung mengalami keterlambatan pembangunan akibat rendahnya investasi, terbatasnya infrastruktur, dan lemahnya konektivitas. Liu (2022) juga menegaskan bahwa konsentrasi pembangunan pada pusat-pusat ekonomi tanpa diimbangi pemerataan investasi dapat meningkatkan kesenjangan pembangunan antarwilayah.

3.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Disparitas Pembangunan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan ketersediaan infrastruktur merupakan faktor utama yang memengaruhi disparitas pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan Kota Palangka Raya. Ketiga variabel tersebut dianalisis menggunakan pendekatan Ordinary Least Squares (OLS) untuk menjelaskan hubungan antara karakteristik wilayah dengan tingkat disparitas pembangunan. Meskipun hasil estimasi koefisien regresi tidak ditampilkan secara rinci, hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berkontribusi terhadap perbedaan tingkat pembangunan antarkawasan.

Wilayah selatan memiliki aktivitas ekonomi yang lebih berkembang sehingga menghasilkan nilai PDRB yang lebih tinggi dibandingkan wilayah utara. Selain itu, konsentrasi penduduk yang lebih besar mendorong berkembangnya perdagangan, jasa, dan pelayanan publik sehingga memperkuat fungsi wilayah selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya. Robert (2021) menjelaskan bahwa perbedaan akses terhadap peluang ekonomi, investasi, dan pelayanan dasar merupakan faktor yang memperlebar ketimpangan pembangunan, khususnya di negara berkembang.

Selain pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat pembangunan suatu wilayah. Hasil survei menunjukkan bahwa indeks infrastruktur wilayah utara sebesar 0,5, sedangkan wilayah selatan mencapai 0,6, yang menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas infrastruktur di wilayah selatan relatif lebih baik. Infrastruktur yang lebih baik meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Azim (2022b) menyatakan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen utama dalam mengurangi disparitas regional karena mampu memperkuat konektivitas dan memperluas kesempatan ekonomi di wilayah yang relatif tertinggal.

3.3 Strategi Pengurangan Disparitas Pembangunan

Berdasarkan hasil analisis, strategi pengurangan disparitas pembangunan di Kota Palangka Raya perlu diarahkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah utara. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan investasi, optimalisasi potensi sumber daya alam, serta penyediaan infrastruktur dasar merupakan langkah strategis untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan.

Selain itu, pembangunan jaringan jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur sosial perlu diprioritaskan agar akses masyarakat terhadap pelayanan publik semakin merata. Menurut Warsilah (2017), pembangunan perkotaan yang inklusif memerlukan pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar sehingga seluruh wilayah memperoleh kesempatan yang sama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan itu, Trinanda (2017)

menegaskan bahwa kebijakan pembangunan berbasis wilayah (place-based development policy) lebih efektif dalam mengurangi disparitas dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan disparitas pembangunan di Kota Palangka Raya memerlukan kebijakan yang terintegrasi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan investasi, serta pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada wilayah yang masih tertinggal. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing wilayah utara, mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah selatan, serta mewujudkan pembangunan wilayah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat disparitas pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil analisis Indeks Williamson, wilayah utara memiliki tingkat disparitas yang lebih tinggi (0,3) dibandingkan wilayah selatan (0,2), yang menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah selatan relatif lebih merata. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi aktivitas ekonomi, distribusi penduduk, serta ketersediaan infrastruktur yang lebih baik di wilayah selatan dibandingkan wilayah utara.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan ketersediaan infrastruktur merupakan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat disparitas pembangunan. Wilayah yang memiliki aksesibilitas lebih baik, aktivitas ekonomi yang lebih berkembang, dan infrastruktur yang lebih memadai cenderung menunjukkan tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur dan rendahnya intensitas kegiatan ekonomi di wilayah utara masih menjadi kendala dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

Berdasarkan temuan tersebut, upaya pengurangan disparitas pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan investasi, pengembangan potensi ekonomi lokal, penguatan UMKM, serta pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah utara. Peningkatan kualitas jaringan jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Dengan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis karakteristik wilayah, Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan mampu memperkecil kesenjangan pembangunan secara proporsional serta mewujudkan pembangunan wilayah yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Fahmi Ginanjar, R. A. (2022a). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarprovinsi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23>
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Fahmi Ginanjar, R. A. (2022b). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarprovinsi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23>
- Díez-Minguela, A., González-Val, R., Martínez-Galarraga, J., Sanchis, M. T., & Tirado, D. A. (2020). The long-term relationship between economic development and regional inequality: South-West Europe, 1860–2010. *Papers in Regional Science*, 99(3), 479–508. <https://doi.org/10.1111/pirs.12489>
- Fransiska, B., & Setiawan, E. (2022). Strategy for Reducing Regional Economic Disparities in Gerbangkertosusila: A Cluster Regional Approach Based on Leading Sectors. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 10(3), 213–225. <https://doi.org/10.14710/jwl.10.3.213-225>
- Gunawan, G., Juanda, B., & Pravitasari, A. E. (2026). Shifting Landscapes: The Impact of Global Pandemic on Regional Development Disparities and Fiscal Resilience. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 10(1 SE-Articles), 551–576. <https://doi.org/10.22437/jiituj.v10i1.53466>
- Iammarino, S., Rodriguez-Pose, A., & Storper, M. (2019). Regional inequality in Europe: Evidence, theory and policy implications. *Journal of Economic Geography*, 19(2), 273–298. <https://doi.org/10.1093/jeg/lby021>
- Liu, Q., Huang, J., Ni, T., & Chen, L. (2022). Measurement of China's Building Energy Consumption from the Perspective of a Comprehensive Modified Life Cycle Assessment Statistics Method. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 14, Number 8, p. 4587). <https://doi.org/10.3390/su14084587>
- Nawir, D., Bakri, M. D., & Syarif, I. A. (2023). Central government role in road infrastructure development and economic growth in the form of future study: the case of Indonesia. *City, Territory and Architecture*, 10(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s40410-022-00188-9>
- Perkasa, P., Gumiri, S., Wahyudi, & Permana, I. (2024). Canal Bulkhead Design Preventing Blockage of River Flow – A Case Study in the Bangah River, Sebangau National Park, Indonesia. *Ecological Engineering and Environmental Technology*, 25(2), 150–156. <https://doi.org/10.12912/27197050/175994>
- Rachmawati, L. N., Lubis, F. R. A., & Azzakiyyah, N. A. (2025). Regional income disparities in Indonesia: Insights from the Williamson index and panel data analysis. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 15(2), 264–271. <https://doi.org/10.12928/optimum.v15i2.12953>
- Robert, S., & Schleyer-Lindenmann, A. (2021). How ready are we to cope with climate change? Extent of adaptation to sea level rise and coastal risks in local planning documents of southern France. *Land Use Policy*, 104, 105354. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105354>
- Rodríguez-Pose, A. (2022). The Rise of Populism and the Revenge of the Places That Don't Matter. *Populism: Origins and Alternative Policy Responses*, 79–104. <https://doi.org/10.31389/lsepress.pop.e>
- Sari, V. A., & Tiwari, S. (2024). The Geography of Human Capital: Insights from the Subnational Human Capital Index in Indonesia. *Social Indicators Research*, 172(2), 673–702. <https://doi.org/10.1007/s11205-024-03322-x>
- Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan. *Matra Pembaruan*, 1(2), 75–84. <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.75-84>
- Warsilah, H. (2017). *Pembangunan Inklusif dan Kebijakan Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ros8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA14&dq=%22kebijakan%22+%22penanggulangan%22+%22pmks%22&ots=OhO_NHm1U2&sig=7qXwvXZIT38DSatYGVUEWhN8pBc